

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dan 34 provinsi, yang sampai saat ini masih dalam upaya untuk terus meningkatkan infrastruktur di setiap pelosok Nusantara, salah satu provinsi yang masih terus meningkatkan infrastrukturnya adalah provinsi NTT yang terdiri dari 21 Kabupaten, 1 kotamadya. (Sumber: <https://id.wikipedia.org>)

Kabupaten Malaka merupakan salah satu Kabupaten dari 21 Kabupaten yang berada di NTT yang terdapat di pulau Timor, Kabupaten ini juga merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belu yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB); Kabupaten Malaka memiliki wilayah seluas 1160,63 km², 12 kecamatan, 127 desa dimana 28 diantaranya terletak di kawasan pesisir selain itu Kabupaten ini juga berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. (*Kabupaten Malaka dalam angka 2019*)

Kabupaten Malaka masih memiliki ketertinggalan dalam infrastrukturnya karena masih merupakan Kabupaten baru maka terdapat beberapa program pembangunan yang masih dalam perencanaan mulai dari pembangunan infrastruktur jalan/jembatan maupun kantor pemerintah, berfokus pada pembangunan bangunan pemerintah yang secara keseluruhan masih kurang dan tidak seperti Kabupaten lainya yang memiliki kantor bupati, kantor kejaksaan, kantor pariwisata, kantor dinas PUPR dan lain-lain.

Sebagai upaya untuk mencapai infrastruktur yang baik maka dalam suatu daerah atau Kabupaten diperlukan pihak yang mampu bertanggung jawab atas segala pembangunan dalam wilayah yang mencakup satu Kabupaten, di Indonesia badan yang bertanggung jawab atas hal ini adalah

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR) yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, secara keseluruhan dinas PUPR memegang peran penting dalam urusan pembangunan daerah dalam lingkup yang luas

Dinas PUPR memiliki susunan organisasi yang terditi dari bagian-bagian yang bergerak pada bidangnya masing-masing, dalam skala besar dinas PUPR memegang peran dalam Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Permukiman, Bina Konstruksi, Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta terdapat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam dinas ini juga terdapat tenaga ahli yang bergerak di bidan tertentu (Sumber:Permen PUPR13 Tahun 2020); Dinas PUPR dalam sebuah Kabupaten sangatlah berperan penting untuk pengembangan Kabupaten yang masih baru ini.

Kabupaten Malaka sudah memiliki Dinas PUPR namun untuk mewadahi para pengurus yang ada dalam Dinas PUPR Kabupaten Malaka masih belum bisa dikatakan maksimal karena tempat yang dipakai untuk bekerja masih menggunakan bangunan KUD yang terletak di Tubaki, kecamatan Malaka Tengah. Untuk itu diperlukan suatu tempat untuk mewadahi aktifitas perkantoran pemerintahan dalam sebuah susunan yang terstruktur secara hirarki sehigga bisa menciptakan lingkungan kerja yang baik dan nyaman terhadap susunan organisasi Dinas PUPR/para pegawai bangunan tersebut,

Dikutip dari “Kajian Penerapan Green Building pada Gedung Bank Indonesi Surakarta 2014”; Pembangunan sangat berpengaruh terhadap kelestarian dan kualitas lingkungan karena menggunakan berbagai jenis sumber daya alam, eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan kemampuan dan daya dukung lingkungan dapat mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Kaitannya dngan masalah kualitas lingkungan ini adalah adanya isu permasalahan global dimana

bangunan menjadi salah satu penyebab pemanasan global karena bangunan berpotensi memproduksi emisi gas karbon lebih dari 40% (Ervianto, 2012)

Sebuah bangunan yang layak huni dan memiliki tingkat kenyamanan bagi pengguna serta dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan yaitu berupa respon terhadap lingkungan untuk meningkatkan operasional bangunan yaitu dari pemanfaatan energi, pengkondisian udara yang baik, pemanfaatan cahaya yang baik, penggunaan material yang ramah lingkungan serta pengelolaan sampah dan limbah yang baik. Hal ini disebabkan oleh timbulnya kesadaran akan menjaga lingkungan dengan menghadirkan konsep bangunan yang ramah terhadap lingkungan yaitu Arsitektur Hijau.

Arsitektur Hijau merupakan suatu pendekatan bangunan yang berusaha untuk meminimalisir berbagai macam pengaruh yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan, tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan *Eco design*, arsitektur ramah lingkungan, arsitektur alami dan pembangunan berkelanjutan. Arsitektur hijau bertujuan untuk menciptakan tempat nyaman dan aman bagi manusia namun tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya, pendekatan ini memanfaatkan kondisi alam, iklim dan lingkungan sekitar secara efisien ke dalam bentuk pengoperasiannya, perancangan Arsitektur Hijau meliputi tata letak, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan, dengan berpatokan pada prinsip-prinsip *Green Architecture*, yaitu *Conserving Energy* (Hemat energi), *Working with Climate* (Memanfaatkan kondisi dan sumber energi alami), *Respect for site* (Menanggapi keadaan tapak pada bangunan), *Respect for user* (Memperhatikan pengguna bangunan), *Minimizing new resources* (meminimalisir penggunaan sumber daya) dan *Holism* (semua prinsip di atas harus secara menyeluruh dijadikan sebagai pendekatan dalam membangun sebuah lingkungan)

Merencanakan dan merancang bangunan yang dapat memberi dampak positif bagi manusia dan lingkungan merupakan suatu tindakan

yang baik yang bisa diterapkan pada bangunan Kantor Dinas PUPR kabupaten Malaka, dapat dikatakan bahwa di kabupten malaka juga Memiliki potensi yang sangat baik untuk penerapan Asitektur Hijau.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan masalah:

- a) Dinas PUPR kabupaten Malaka yang masih belum memiliki bangunan kantor sendiri dan masih menggunakan bangunan milik Koperasi Unit daerah.
- b) Pemanfaatan ruang serta sirkulasi yang terarah sesuai hirarki dinas PUPR
- c) Meningkatkan operasional bangunan dari segi Pengelolaan tapak, Efisiensi penggunaan Energi, Efisiensi penggunaan air, Kualitas udara dalam ruang, Pengendalian penggunaan material, pengolahan air limbah sesuai dengan pendekatan Arsitektur Hijau/ *Green Building*
- d) Kemampuan desain struktur dan utilitas bangunan yang mampu memberi rasa aman dan nyaman kepada pengguna bangunan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah:

Bagaimana cara dan strategi dalam menyusun konsep desain Kantor Dinas PUPR Kabupaten Malaka dengan Pendekatan Arsitektur Hijau?

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

Merencanakan dan merancang kantor Dinas PUPR kabupaten Malaka yang baik, untuk memenuhi tuntutan fasilitas gedung sebagai wadah untuk menampung aktifitas perkantoran dengan memperhatikan bagian bagian penting dalam pencapaian menuju Arsitektur Hijau/ *Green Building*

1.4.2 Sasaran

- a. Sasaran yang akan dicapai adalah: memberikan ruang yang layak kepada pegawai dinas PUPR maupun pengunjung agar mendapatkan kenyamanan dalam berkatifitas.
- b. Peerapan persyaratan bangunan hijau berupa: Pengelolaan tapak, Efisiensi penggunaan Energi, Efisiensi penggunaan air, Kualitas udara dalam ruang, Pengendalian penggunaan material, pengolahan air limbah pada objek perancangan.
- c. Perencanaan terhadap sistem struktur pada bangunan yang aman dan stabil.
- d. Sistem utilitas bangunan yang dibuat senyaman mungkin bagi pengguna

1.5 Ruang Lingkup/Batasan

1.5.1 Ruang Lingkup Wilawah Studi

Objek studi berada di area pusat kota Malaka Tengah sebagai lokasi pengembangan perkotaan di kabupaten Malaka pada lokasi ini juga merupakan tempat strategis karena berada pada lokasi yang mudah diakses.

1.5.2 Ruang Lingkup Substansi

Sesuai tujuan dan sasaran di atas, maka ruang lingkup substansi pada penulisan ini adalah: aktifitas perkantoran Dinas PUPR dan prinsip serta persyaratan Arsitektur Hijau.

1.6 Metodologi penelitian

1.6.1 Pengungumpulan data

Pengumpulan data meliputi:

- a. Data Primer yaitu data yang langsung diambil oleh peneliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara:

- 1) Observasi (pengamatan Lapangan), yaitu:

Melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan data mengenai:

- *Eksisting site*

Data-data eksisting yang perlu di ambil seperti data topografi, vegetasi, arah angin, orientasi matahari, kebisingan, fasilitas-fasilitas, aksesibilitas, view yang ada di site

- *Luasan Site*

Melakukan pengukuran pada lokasi site yang akan digunakan sebagai lokasi perencanaan

- Aktivitas masyarakat

Melihat langsung aktivitas masyarakat setempat.

- Keadaan lingkungan non-fisik sekitar lokasi

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan dan melakukan wawancara langsung atau tatap muka langsung dengan narasumber, jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara secara terstruktur sebagai pertanyaan tertulis agar peneliti bisa bertanya berdasarkan pertanyaan yang sudah disiapkan dan wawancara secara bebas tanpa menggunakan wacana untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spontan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan instansi.

3) Pengamatan

Mengambil foto yang diperlukan sebagai dokumentasi dalam perancangan. Gambar yang diperlukan adalah: Kondisi eksisting site, serta dokumnetsi yang berkaitan dengan proses perencanaan.

4) Pengukuran

Melakukan pengukuran langsung pada lokasi untuk memperoleh ukuran yang akurat sebagai landasan dan mempermudah dalam melaksanakan pengerjaan konsep dan desain.

5) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari berbagai Sumber terpercaya dan yang berkaitan dengan judul data-data dapat berupa studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal, regulasi pemerintah, maupun penelitian terdahulu.

1.6.2 Metoda Analisa

Metoda analisa yang dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Kualitatif

Analisa hubungan sebab akibat, penentuan masalah, penentuan dan konsep relevan dalam kaitan dengan perencanaan kantor dinas PUPR Kabupaten Malaka, dalam penelitian ini menggunakan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan.

2. Kuantitatif

Analisa ini dengan membuat perhitungan-perhitungan tertentu yang berkaitan langsung dengan proses perencanaan. Pada analisa ini data-data yang akan diperlukan berupa data pengukuran lapangan, data fenomena yang terjadi berupa jumlah pegawai setiap tahunnya dan kebutuhan ruang dalam proses penyusunan konsep desain kantor Dinas PUPR Kabupten Malaka, dan pada akhirnya yang akan dihasilkan berupa diagram yang menunjukkan presentasi dari hasil perhitungan sesuai data yang diperoleh peneliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I Pendahuluan:

Pada BAB I, pokok bahasan yang akan diulas adalah: Latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup/batasan studi, metoda analisa, sistematika penulisan dan kerangka berpikir.

BAB II Tinjauan pustaka/landasan teori:

Pada BAB ini akan dijelaskan tentang: Pengertian judul, Pengertian Kantor Dinas PUPR, Arsitektur Hijau dan obyek studi banding

BAB III Gambaran umum lokasi penelitian:

Pada BAB III hal-hal yang akan di jelaskan adalah: Pembahasan tentang gambaran umum lokasi perencanaan.

BAB IV Analisa

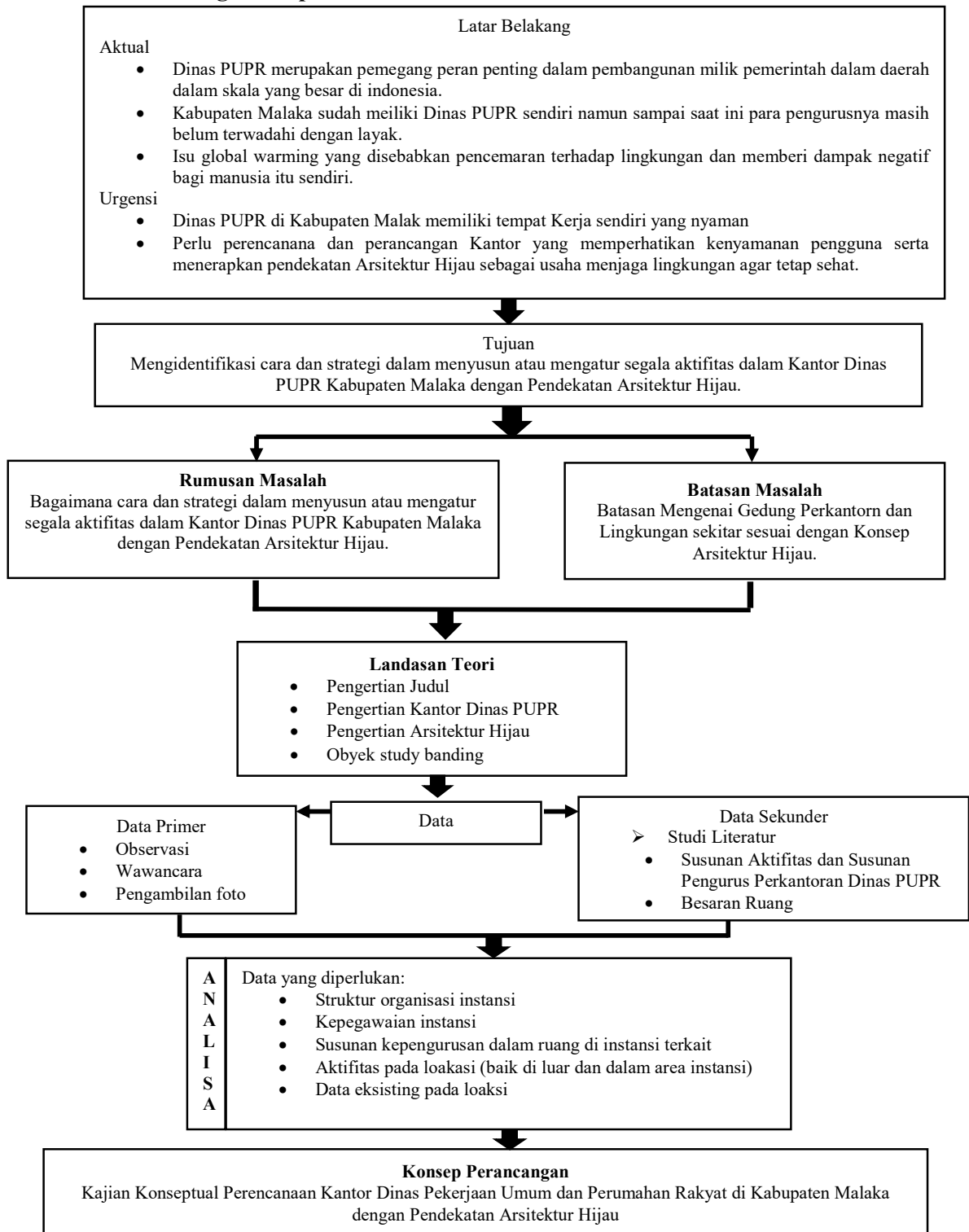
Pembahasan pada BAB ini adalah:

Proses analisa data yang di dapat dari hasil penelitian (hasil survei dan referensi yang bersumber dari buku dan internet)

BAB V Konsep

Pembahasan pada BAB V ini akan di jelaskan mengenai konsep-konsep perencanaan dari hasil analisa sehingga menghasilkan sebuah desain sesuai pendekatan Arsitektur Hijau.

1.8 Kerangka Berpikir



Bagan 1. Kerangka berpikir penelitian (sumber: Analisa Penulis)

Dalam perencanaan Kantor Dinas PUPR di Kabupaten Malaka, menggunakan pendekatan Arsitektur Post Modern. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: memahami objek perancangan untuk mengidentifikasi masalah dalam perencanaan bangunan gedung kantor sehingga dapat merumuskan suatu permasalahan dan mendapatkan tujuan yaitu mengidentifikasi cara dan strategi dalam perencanaan Kantor Dinas PUPR di Kabupaten Malaka dengan Pendekatan Arsitektur Hijau.